

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**PERSPEKTIF GENDER SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA**



Oleh:

FARKHAN JUNAEDI, S.H.
NIM. 032014153043

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PERSPEKTIF GENDER SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**FARKHAN JUNAEDI
NIM. 032014153043**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Tanggal**

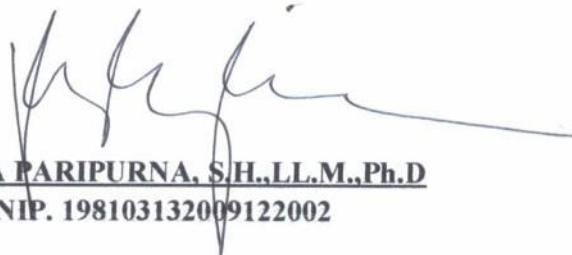
Oleh :

Dosen Pembimbing Ketua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198004172005011005

Pembimbing Kedua



AMIRA PARIPURNA, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198103132009122002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum.
NIP. 19640107 198903 2001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal, 24 Mei 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D

Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
Ruang : Ujian Lt 1
Pukul : 13.30 WIB
Nama Mahasiswa : Farkhan Junaedi. S.H.
Nim : 032014153043
Judul : Perspektif Gender Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam
Putusan Perkara Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, Mei 2022
Yang membuat pernyataan



FARKHAN JUNAEDI. S.H.
NIM. 032014153043

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Gender sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana dan Ratio decidendi putusan hakim terkait perspektif gender sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara pidana.

Salah satu contoh pertimbangan hakim yang meringankan dalam perspektif gender adalah jika pelaku tindak pidana adalah seorang perempuan atau seorang ibu. Tentu hakim harus membedakan antara perempuan pelaku tindak pidana korupsi dengan perempuan yang mencuri susu untuk anaknya atau perempuan dalam kejahatan terorisme. Di dalam kejahatan terorisme, ketentuan hukum pidana yang terkait dengan kejahatan terorisme biasanya dirumuskan secara *gender-neutral*. Berbeda halnya dengan tindak pidana korupsi, dimana perempuan masih banyak mendapatkan perlakuan istimewa baik dalam proses penanganan perkara maupun putusan hakim. Terkait pertimbangan berbasis peran gender, ada kebutuhan untuk memperkuat pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan substansif yang menjadi kerangka pikir Hakim dalam mempertimbangkan hal tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan kesetaraan gender dan mewujudkan prinsip non-diskriminasi berbasis gender. Dalam memutus suatu perkara, selain derajat keseriusan tindak pidana, Hakim juga dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam perumusan putusan pembedaan, baik yang memberatkan ataupun meringankan hukuman. Hal ini dimaksudkan agar hukuman yang diberikan juga proporsional untuk mencapai tujuan dari pembedaan. Hanya saja, sampai sekarang belum terdapat pedoman yang jelas yang dapat dirujuk oleh Hakim dalam perumusan hukuman yang dijatuhkan itu. Terkait pertimbangan berbasis peran gender, ada kebutuhan untuk memperkuat pemahaman mengenai kesetaraan dan keadilan substansif yang menjadi kerangka pikir dalam Peraturan Mahkamah Agung 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Hukum (PBH). Dalam peraturan ini Hakim dalam pemeriksaan perkara baik tingkat pertama, banding maupun kasasi perlu mempertimbangkan kesetaraan gender dan mewujudkan prinsip non-diskriminasi berbasis gender. Kemawasan pada stereotipe gender semestinya juga perlu diaplikasi dalam perumusan pertimbangan hukuman. Perlu dicatat bahwa sampai sekarang sejumlah putusan hakim juga masih menggunakan pertimbangan peran gender baik pada terdakwa laki-laki juga perempuan.

Kata Kunci : Gender, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim

ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a statutory approach, and a conceptual approach. The problems in this thesis are: Gender as the basis for judges' considerations in criminal case decisions and the Ratio decidendi of judges' decisions related to gender perspective as a consideration in deciding criminal cases.

One example of a judge's mitigating consideration in a gender perspective is if the perpetrator of a crime is a woman or a mother. Of course the judge must distinguish between women who are perpetrators of corruption and women who steal milk for their children or women in terrorism crimes. In terrorism crimes, criminal law provisions related to terrorism crimes are usually formulated in a gender-neutral manner. This is different from the case of corruption, where many women still get preferential treatment both in the process of handling cases and judge decisions. Regarding gender role-based considerations, there is a need to strengthen the understanding of equality and substantive justice which forms the framework for judges in considering these matters. Judges need to consider gender equality and realize the principle of gender-based non-discrimination. In deciding a case, in addition to the degree of seriousness of the crime, the judge can also consider several factors in the formulation of the sentencing decision, whether burdensome or lightening the sentence. This is intended so that the punishment given is also proportional to achieve the objectives of the punishment. However, until now there has been no clear guideline that the judge can refer to in the formulation of the sentence handed down. Regarding gender-role-based considerations, there is a need to strengthen the understanding of equality and substantive justice which is the framework for thinking in Supreme Court Regulation 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Women in Facing the Law (PBH). In this regulation, judges in examining cases at the first level, appeals and cassation need to consider gender equality and realize the principle of gender-based non-discrimination. Awareness of gender stereotypes should also be applied in the formulation of sentencing considerations. It should be noted that until now a number of judges' decisions have also taken into account gender roles for both male and female defendants.

Keywords: *Gender, Judge's Consideration, Judge's Decision*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **PERSPEKTIF GENDER SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA**. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II dan Bapak Maradona, SH.,LL.M., Ph.D selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum selaku Ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Bapak Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I;
5. Ibu Amira Paripurna, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen MKPT II;
6. Ibu Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A. selaku Dosen MKPT I;
7. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
8. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;

9. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memberikan motivasi dan semua bantuannya;
10. Istri tercinta Bintang Reta Nurarna dan Anak tersayang Aleena Jehaan Fahrecia Junaedi yang selalu memberikan dorongan setulus hati kepada Penulis dalam menyelesaikan studi program pascasarjana;
11. Semua keluarga yang telah memberikan doa dan semangat kepada Penulis;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Mei 2022

Farkhan Junaedi, S.H.
NIM. 032014153043

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Konsep Gender	9
1.5.2. Konsep Putusan Hakim	11
1.5.3. Konsep Pertimbangan Hakim	15
1.6. Metode Penelitian	19
1.6.1. Tipe Penelitian	19
1.6.2. Pendekatan Masalah	20
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	21
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	23
1.7. Sistematika Penulisan	23

BAB II	GENDER SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA.....	25
2.1.	Gender	25
2.1.1.	Kesetaraan Gender	25
2.1.2.	Ketidakadilan Gender	28
2.1.3.	Faktor Penyebab Ketidakadilan Gender	34
2.2.	Pertimbanagn Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana.....	39
2.2.1.	Keadaan Memberatkan	39
2.2.2.	Keadaan Meringankan	43
2.3.	Dasar Gender Sebagai Pertimbangan Hakim	45
 BAB III	 RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERKAIT PERSPEKTIF GENDER SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA	 52
3.1.	Teori Feminisme	52
3.1.1.	Pengertian Feminisme.....	52
3.1.2.	Aliran-Aliran Dalam Feminisme	54
3.2.	Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Permasalahannya.....	67
3.3.	Ratio Decidendi Putusan Hakim Terkait Perspektif Gender .	74
3.3.1.	Contoh Putusan Hakim Terkait Perspektif Gender	74
3.3.2.	Analisis Putusan	78
 BAB IV	 PENUTUP	 88
4.1.	Kesimpulan	88
4.2.	Saran.....	89

DAFTAR BACAAN